

Kader Kampung

*Partisipasi Anak Muda Papua dan
Papua Barat untuk Memajukan Kampung*



➤ BENTUK KOMPAK melalui kegiatan LANDASAN yang didesain untuk Papua dan Papua Barat secara khusus menargetkan penyelesaian masalah-masalah pelayanan dasar di masyarakat. Dimulai sejak awal 2017, LANDASAN saat ini dilaksanakan di 225 kampung yang tersebar di 6 kabupaten di Provinsi Papua dan 4 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Dalam pelaksanaan kegiatannya, LANDASAN memanfaatkan pemuda-pemudi kampung sebagai kader pemberdayaan masyarakat untuk mengumpulkan serta mengelola data tersebut dengan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) yang dibangun serta diterapkan di kampung-kampung secara bertahap.

➤ LATAR BELAKANG Saat ini Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tengah aktif dalam mengejar ketertinggalan melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di berbagai tingkat pemerintahan. Salah satu diantaranya adalah dana kampung/desa yang telah diterima di seluruh kampung di kedua propinsi ini sejak tahun 2015. Besaran dana desa yang diterima per kampung saat ini berkisar antara Rp. 800 juta dan Rp. 1,5 Milyar. Untuk masyarakat Papua dan Papua Barat, Kampung merupakan sendi utama dari struktur sosial budaya setempat. Sayangnya, membangun kampung di kedua provinsi tertimur Indonesia ini bukanlah sebuah hal yang mudah. Kendala infrastruktur membatasi akses terhadap layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), kurangnya ketersediaan SDM yang cakap dan memadai di kampung karena tingkat pendidikan rata-rata yang cukup rendah, serta sangat minimnya data mengenai kampung dan masyarakat merupakan kendala utama dalam membangun kampung di Papua dan Papua Barat.

Kader pemberdayaan masyarakat kampung yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Pasal 4) telah berfungsi sebagai pendamping Kepala Desa dalam pengorganisasian pembangunan kampung. Selain itu sebagaimana mandat dari Peraturan Menteri Desa tersebut para Kader Kampung ini juga berfungsi sebagai perantara, penggerak, pembimbing serta perencana yang mengadvokasi juga melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuannya masing masing.

➤ PIHAK TERLIBAT Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan desa.



➤ **DAMPAK** Melalui desain program yang dirancang dengan latar belakang pemahaman konteks lokal Papua, maka perubahan menuju kebaikan tersebut disambut dengan tangan terbuka.

Sejak pemberdayaan Kader Kampung sebagai bagian dari program LANDASAN dilaksanakan, telah didapat beberapa dampak positif sebagai berikut:

1. Kampung dan distrik memiliki data-data kependudukan, sosial dan ekonomi masyarakat yang akurat dan dipakai dalam menentukan prioritas perencanaan dan penganggaran kampung.
2. Kerjasama lintas sektor (pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kampung) yang dikawal oleh Kepala Distrik/Camat dan didukung oleh data-data yang akurat, telah meningkatkan kualitas dan cakupan layanan dasar tersebut seperti terlihat di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Distrik Sentani Timur saat ini dijadikan prototype dan pusat pembelajaran bagi Kabupaten-Kabupaten lain.
3. Membangun kampung melalui penguatan kader kampung telah terbukti berhasil dan berkelanjutan. Saat ini LANDASAN telah melatih 425 kader, 112 diantaranya adalah perempuan, yang tersebar di semua lokasi LANDASAN.

➤ **PROSES** Berbagai intervensi dilakukan di tingkat distrik, puskesmas, sekolah, dan kampung, antara lain sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pendampingan dalam bidang perencanaan dan penganggaran di bidang kesehatan dan pendidikan di tingkat kabupaten.
2. Pelatihan dan pendampingan untuk aparat serta masyarakat kampung melalui kader-kader kampung dalam perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan program kampung agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan kesehatan, pencegahan HIV/AIDS, dan pendidikan melalui pengelolaan yang lebih akuntabel dan transparan.
3. Pelatihan dan pendampingan unit layanan dasar agar menerapkan prosedur yang lebih baik sehingga meningkatkan kepatuhan unit layanan terhadap Standar Pelayanan Minimum (termasuk standar untuk pencegahan dan penanganan HIV/AIDS) dengan indikator kinerja yang telah disetujui.
4. Pelatihan dan pendampingan distrik agar dapat memanfaatkan bukti dan pemahaman tentang permasalahan lokal untuk meningkatkan layanan serta sebagai pusat pengembangan wilayah.

"Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mengembangkan SAID untuk mendukung pelayanan lini depan di desa dan kecamatan"

➤ PROSES REPLIKASI

Penggunaan data berbasis masyarakat yang dikumpulkan oleh para kader kampung dan dikelola melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) menjadi modal utama dalam upaya perbaikan layanan dasar ini. SAIK yang sudah dibangun di seluruh kampung dalam satu distrik (sebutan untuk Kecamatan di Papua dan Papua Barat) dikumpulkan dan digabung menjadi Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID) dan dihubungkan dengan system informasi di Puskesmas dan sekolah.

➤ PERKEMBANGAN TERKINI

Dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, beberapa wilayah implementasi program telah menunjukkan indikasi perubahan, antara lain:

1. Beberapa Puskesmas dan Sekolah Dasar telah melakukan perubahan perencanaan dan penganggaran kegiatan, serta perbaikan kualitas layanan yang didukung oleh pemerintah kampung melalui alokasi dana pembangunan kampung (Dana Desa, Dana Alokasi Kampung).
2. Sekitar 199 kampung telah memiliki Sistem Administrasi & Informasi Kampung (SAIK) dan memanfaatkannya untuk perencanaan kampung. Dampak langsung dari aplikasi SAIK adalah meningkatnya alokasi pendanaan untuk kebutuhan perbaikan kualitas layanan dasar.
3. Aplikasi Sistem Administrasi dan Informasi Distrik yang berfungsi sebagai hub seluruh informasi dan data dari kampung serta unit layanan telah selesai disiapkan dan telah diaplikasikan di 1 distrik (Distrik Sentani Timur, Jayapura) untuk pemantauan pembangunan di wilayahnya, khususnya dalam pemberian pelayanan dasar.
4. Pemerintah Kampung dari 7 kampung yang berada di Distrik Sentani Timur mengalokasikan anggaran kampung untuk kebutuhan-kebutuhan Puskesmas yang belum ada pendanaannya, seperti membuat pagar Puskesmas, perbaikan halaman Puskesmas, dll.
5. Pembina Teknis Pemerintah Kampung yang berasal dari 24 distrik di Papua dan Papua Barat telah memiliki kapasitas untuk mendampingi kampung dalam perencanaan dan penganggaran kampung; pengelolaan keuangan serta penyusunan peraturan kampung.
6. Aparat, kader dan perwakilan masyarakat dari 199 kampung kini telah mampu menyusun perencanaan kampung (RPJMK dan RKPK/APBK) yang berpihak kepada masyarakat miskin dan Orang Asli Papua (OAP).
7. Hingga akhir April 2018 sebanyak 425 kader desa/kampung (313 laki-laki dan 112 perempuan) telah dilatih untuk pengelolaan dan pemanfaatan data SAIK. Mereka juga melakukan asistensi ke kampung lain di wilayah non-LANDASAN terkait penyiapan SAIK.



"Saat ini KOMPAK-LANDASAN telah melatih 403 kader, 110 diantaranya adalah perempuan, yang tersebar di semua lokasi KOMPAK-LANDASAN"

TANTANGAN

1. Mendorong distrik untuk dapat berperan sebagai penanggungjawab kewilayahan yang mampu mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara kampung dan unit layanan.
2. Mendorong pemerintah dan masyarakat kampung untuk lebih mandiri dalam melakukan perencanaan dan penganggaran kampung yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berbasis data. Selain itu, pemerintah diharapkan mampu mengelola keuangan kampung secara akuntabel dan transparan, dengan masyarakat yang terlibat dalam pemantauan pembangunan kampung.
3. Mendorong unit layanan untuk memenuhi standar pelayanan minimum, memperbaiki manajemen layanan dan melibatkan masyarakat dalam perbaikan pelayanan.
4. Mendorong pemerintah Kabupaten untuk memberi respons cepat terhadap perubahan yang terjadi di tingkat kampung, Puskesmas dan Sekolah Dasar.
5. Mendorong keterlibatan masyarakat adat Papua, gereja dan pihak swasta dalam program.